

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan teori, metode pencatatan Basis Akruial lebih memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi Basis Akruial adalah suatu basis Akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa Akuntansi diakui, diatur dan disajikan dalam Laporan Keuangan, berdasarkan pengaruh transaksi, pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual mendasar kepada 2 konsep yaitu Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Beban.

Namun dalam prakteknya di tingkat Polrestabes Semarang, pencatatan kegiatan antara Operator Simak BMN dengan Operator Simak Sakpa/Seiba harus seimbang atau sama.

Pada tingkat Polrestabes Semarang sistem yang digunakan adalah sistem transfer masuk dimana semua barang-barang yang masuk akan dicatat didalam transfer masuk TA 2015 dengan dokumen pendukung berupa:

1. ADK (Administrasi Data Komputer)
2. SPPM (Surat Perintah Pengeluaran Materiil)

Dengan digunakannya sistem transfer masuk maka Polrestabes Semarang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi (pencocokan) dengan operator Sakpa/Seiba, Sikeu;
2. melaksanakan rekonsiliasi dengan operator Simak Wilayah/Simak W (Biro Sarpras Polda Jateng);
3. Bidkeu sebagai pembina fungsi;
4. KPKNL (Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang).

Selain barang-barang persediaan, adapula pendapatan dan pembiayaan yang dicatat dalam sistem Akuntansi Berbasis Akruial, yaitu:

1. Pendapatan.....

1. Pendapatan:

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pendapatan contohnya yaitu:

- a. Tanah yang merupakan aset dari Polrestabes kemudian disewakan kepada pihak ketiga (ATM BRI, jaringan telkom). Maka dalam hal ini operator simak BMN akan mencatat tanah yang disewakannya atau (aset tetap). Sedangkan pendapatan hasil sewa tanah akan dimasukkan atau dicatat oleh operator Sakpa/Seiba.
- b. Kantin yang disewakan kepada pihak ketiga, maka operator simak akan membukukan tanah/tempat yang disewakan sebagai aset tetap, sedangkan pendapatan hasil sewa dicatat/dibukukan oleh operator Sakpa/Seiba.

2. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan:

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Contoh penerimaan pembiayaan yaitu:

Droping obat-obatan, maka obat-obatan tersebut oleh operator Simak BMN akan dicatat sebagai barang persediaan, sedangkan biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut, akan dicatat oleh operator Sakpa/Saiba sebagai beban biaya yang timbul.

b. Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Contoh.....

Contoh pengeluaran pembiayaan yaitu:

Pembelian BBM. Bahwa dalam pembelian BBM, mengandung komponen:

- 1) Harga BBM per liter
- 2) Ongkos angkut

Harga BBM dan ongkos angkut dialokasikan dalam DIPA Polrestabes Semarang. Dimana pembelian BBM akan menambah persediaan BBM yang akan dicatat oleh operator Simak BMN.

Sedangkan untuk ongkos angkut dan pembelian harga BBM, akan dicatat oleh operator Sakpa/Saiba sesuai dengan jumlah yang telah diperhitungkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua. 2014.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Resort dan Kepolisian Sektor. 2010.
- Martani, D., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. 2015.
Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, S. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.